

# Menebar Inovasi Menyemai Kemajuan

**10 Program Peraih Otonomi Awards 2010 Sulawesi Selatan**

**Penulis :**

Basir Kadir  
Milawaty  
Ahmad Syam  
Sundari Usman  
Andi Mattingaragau Tenrigau

**Editor :**

Sukriansyah S. Latief  
Nurdin Tappa

**Desain Sampul dan Grafis :**

Ronald

**Diterbitkan:**

The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)

**Didukung:**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
The Asia Foundation  
PT International Nickel Indonesia, Tbk. (PT Inco)

**Alamat Penerbit:**

The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)  
Graha Pena Lt 4 Jl. Jend. Urip Sumoharjo 20,  
Makassar

Telp. 0411-3661928, Fax. 0411-3661923

Email: [fipo@fajar.co.id](mailto:fipo@fajar.co.id)

Website: [www.fipo-fajar.org](http://www.fipo-fajar.org)

ISBN:978-602-95604-1-1

# Daftar Isi

<b>Sambutan Direktur FIPO</b>	iv
<b>Sambutan Direktur The Asia Foundation</b>	v
<b>Menebar Inovasi, Menyemai Kemajuan</b>	viii
<b>Meretas Pundi Investasi di Jalur Sutera</b> Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau	2
<b>Mengail Asa di Sawah Tadah Hujan</b> Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau	6
<b>Berdayakan Ekonomi dengan Potensi Lokal</b> Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau	10
<b>Menggali Nilai Kecerdasan Lokal di Bumi Rewako</b> Laporan: Milawaty	14
<b>Mencabut Akar Kematian di Kota Idaman</b> Laporan: Milawaty	18
<b>Pelayanan yang Ramah Pelanggan</b> Laporan: Sundari Usman	22
<b>Menggalang Potensi dan Kemandirian Lokal</b> Laporan: Sundari Usman	26
<b>Menutup Rapat Pintu Masuk KKN</b> Laporan: Sundari Usman	32
<b>Bahu-membahu Menerangi Gelap</b> Laporan: Ahmad Syam	37
<b>Inspirasi Sehat dari Desa Bebas Rokok</b> Laporan: Ahmad Syam	42
<b>Profil The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)</b>	46
<b>Profil The Asia Foundation</b>	48
<b>Profil PT International Nickel Indonesia, Tbk. (PT Inco)</b>	49
<b>Biodata Penulis dan Editor</b>	62

# Mendorong Inisiatif Pembangunan dari Daerah

Basir Kadir  
Direktur Program Fajar Institute of Pro Otonomi

Monitoring dan Evaluasi (monev) program pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang dilakukan The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Jika pada pagelaran Otonomi Awards 2009 FIPO menemukan hanya 164 program inovatif maka pada Otonomi Awards 2010 meningkat menjadi 199 program.

Peningkatan tersebut disebabkan dua faktor penting, yakni: pertama, meningkatnya kepercayaan pemerintah kabupaten dan kota kepada FIPO sehingga tidak lagi merasa canggung untuk membuka diri atas program-program yang dijalankannya; dan kedua, adanya diseminasi informasi kegiatan Otonomi Awards di media massa yang memungkinkan kabupaten dan kota secara tidak langsung saling mempelajari dan mereplikasi program-program inovasi.

Sejak awal FIPO memang telah berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyelenggara kegiatan bertajuk Otonomi Awards tetapi juga terus memikirkan langkah dan cara efektif untuk mendorong kemajuan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Karena itu, selain mempublikasikan hasil-hasil temuan program di media massa, FIPO juga melakukan bentuk diseminasi informasi lainnya melalui buku.

Buku Menebar Inovasi, Menyemai Kemajuan merupakan kumpulan tulisan dari 10 program peraih Otonomi Awards 2010. Kenapa program-program terbaik tersebut perlu dibukukan? Selama empat bulan FIPO melakukan penelitian, mewawancarai bupati/walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 23 kabupaten dan kota hanya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang seluruh aspek dari program, dari mekanisme hingga pembiayaannya. Hasilnya, terdapat 10 program terbaik dan dengan status sebagai program pemenang tentu saja memiliki keunggulan dibandingkan program-program lainnya. Keunggulan program tersebut yang hendak disebarluaskan bukan hanya kepada pemerintah kabupaten dan kota yang belum berhasil memasukkan programnya ke dalam sepuluh program terbaik tetapi juga kepada stakeholder pembangunan lainnya yakni masyarakat dan pihak swasta.

Akhir kata, semoga buku bermanfaat dan menjadi referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam program pembangunan demi kemajuan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan. Selamat membaca dan berinovasi.

Makassar, September 2010

# Otonomi Awards: Mendorong Proses Belajar dari Inovasi Tetangga

Erman A. Rahman

Director for Local Governance and Economic Programs The Asia Foundation

Hampir sepuluh tahun sudah otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Di atas kertas, desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada penggunanya, menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) ke arah masyarakat, mendorong perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini merupakan satu yang terdrastis di dunia. Jika desentralisasi di Filipina dinilai sebagai “*big bang*,” apa yang dilakukan di Indonesia bisa disebut sebagai “*bigger bang*,” sangat revolusioner. Namun demikian, pelaksanaannya menuai cukup banyak kritik –mendesentralisasikan korupsi, menciptakan raja-raja kecil, makin menyulitkan dunia usaha, memperburuk pelayanan publik, menyerahkan kewenangan kepada pemda yang kapasitasnya rendah dan belum siap. Selain itu, peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum lengkap dan cukup banyak yang kontradiktif –belum lagi tidak dilaksanakan dengan baik dan konsisten– membuat banyak pihak mempertanyakan “kebenaran” desentralisasi. Apakah desentralisasi dan otonomi daerah mampu mencapai tujuannya?

Terlepas dari berbagai kelemahan dan tidak konsistennya pelaksanaan desentralisasi, kami masih percaya bahwa kondisi Indonesia yang sangat luas, dengan masalah dan tantangan yang sangat berbeda di satu daerah dengan lainnya, tidak memungkinkan negara ini “diurus” dari Jakarta semata. Sama halnya dengan proses demokratisasi yang berjalan beriringan dengan desentralisasi, segala permasalahan ini perlu kita hadapi dan cari solusinya tanpa berbalik arah menuju sentralisasi. Pemberian otonomi awards dan penerbitan buku yang mendokumentasikan berbagai inovasi yang telah dijalankan pemda kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjawab berbagai tantangan otonomi daerah tersebut. Dalam pandangan kami, ada empat hal penting yang membuat awards dan buku ini penting.

Pertama, berbagai inovasi yang dilaksanakan berbagai daerah ini menunjukkan niat yang kuat dan kapasitas yang tinggi dari beberapa kabupaten/kota untuk mendorong pencapaian tujuan otonomi daerah. Inovasi dan reformasi kebijakan yang teridentifikasi dan didokumentasikan dalam buku ini sangat bervariasi – mulai dari industri kecil, pertanian, irigasi, kesehatan, pelayanan perijinan dan kewarganegaraan, pengadaan barang dan jasa, sampai pengembangan energi alternatif. Beberapa di antaranya sangat spesifik. Misalnya, berbagai program untuk mendorong produksi dan promosi sutera di Wajo. Namun, banyak di antara inovasi di sini merupakan upaya untuk menangani masalah yang juga terjadi di banyak daerah lainnya. Pembangunan 13 unit pembangkit listrik tenaga mikro hidro di

Enrekang, misalnya, merupakan tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi banyak daerah. Daripada bolak balik mengeluh dan meminta pemerintah pusat untuk mengatasinya, pemda mengambil inisiatif sendiri yang dalam waktu singkat dapat membantu masyarakat untuk maju. Ada juga inovasi yang menangkap “isu-isu urban,” seperti desa bebas rokok di Enrekang dan e-procurement di Luwu Utara. Jika kabupaten yang relatif terpencil bisa melaksanakannya, mengapa daerah yang relatif lebih berkembang tidak bisa?

Kedua, walaupun belum ada analisis yang secara komprehensif mendokumentasikannya, pengalaman dan pengamatan kami menunjukkan bahwa pemda lebih mudah tergerak dan berkomitmen untuk mereplikasi –“menyontek dalam arti positif”– apa yang dilakukan daerah lainnya, daripada menuruti apa yang diperintahkan pemerintah pusat. Dalam hal pelayanan perijinan yang banyak didukung oleh The Asia Foundation, misalnya, sangat banyak pemda yang tergerak untuk belajar dari kabupaten/kota yang telah membentuknya lebih dahulu, walau tidak dapat dipungkiri bahwa “perintah” pemerintah pusat kemudian memperkuatnya. Karena itu, diseminasi informasi yang luas akan inovasi yang telah dilakukan suatu daerah serta pemberian awards mendorong iklim kompetitif yang positif. Bupati atau walikota yang melihat tetangganya lebih baik cenderung untuk lebih tergerak untuk belajar ataupun mencari inovasi lain yang dapat “menyaingi” kabupaten/kota tetangga. Efek bola salju eksternal –dimulai dari sedikit daerah kemudian diikuti oleh banyak daerah lainnya– mungkin merupakan jawaban untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah, bukan perintah atau program pemerintah pusat yang memasuki “wilayah” kewenangan pemda.

Ketiga, cukup banyak daerah yang menunjukkan fenomena efek bola salju internal –inovasi yang satu mendorong yang lainnya di satu daerah. Pembentukan pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perijinan usaha mendorong pemda untuk juga menerapkan pelayanan dengan kualitas yang sama untuk kewarganegaraan (akte kelahiran, kematian, perkawinan, dan sebagainya) seperti yang dilakukan Kota Parepare. Di Kota Cimahi (Jawa Barat), misalnya, penyebaran “virus” pelayanan publik yang lebih baik ini bahkan memasuki sektor-sektor lain seperti pelaksanaan pengadaan satu pintu dan peningkatan layanan puskesmas. Di Kota Surabaya (Jawa Timur), keberhasilan e-procurement mendorong mereka untuk juga menerapkan “e” (sistem elektronik) untuk perencanaan, penganggaran dan pemantauan program-program pembangunan.

Keempat, selain kerjasama antara organisasi nonpemerintah dengan perusahaan swasta, keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerbitan buku ini patut mendapatkan catatan khusus. Dalam pandangan kami, peranan pemerintah provinsi merupakan salah satu titik terlemah arsitektur otonomi daerah di Indonesia. Akuntabilitas ganda gubernur –menjadi wakil pemerintah pusat tetapi dipilih langsung rakyat dan diawasi juga oleh DPRD provinsi– serta kewenangan pemerintah provinsi yang sangat sedikit membuat sebagian besar provinsi “kebingungan” menjalankan fungsinya. Sebagian besar malah menjalankan program yang

menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota. Salah satu peran penting pemerintah provinsi yang belum banyak dilaksanakan adalah untuk memantau, mendokumentasikan, dan menyebarkan informasi yang baik (dan buruk) yang dilakukan pemda kabupaten/kota dan kemudian membantu kabupaten/kota untuk memperbaiki kinerjanya, terutama melalui proses belajar antar kabupaten/kota. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerbitan buku ini merupakan suatu inisiatif yang patut diapresiasi.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) atas pemberian otonomi awards dan penerbitan buku ini. Kami yakin bahwa buku ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah untuk mencapai tujuannya.

**Jakarta, Agustus 2010**

•••

# Menebar Inovasi Menyemai Kemajuan

10 Program Peraih FIPO-Otonomi Awards 2010



*Best practices*, sebagai suatu konsep, bermula dari gagasan-gagasan kreatif atau lazim disebut sebagai inovasi yang dijalankan untuk menjawab masalah-masalah baru atau sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah lama dengan cara yang baru. Inovasi merupakan dasar konsep *best practices* meski tidak semua inovasi pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai *best practices* karena hanya inovasi yang *sustainable* (berkelanjutan) yang dianggap sebagai *best practices*.

Apa sesungguhnya definisi *best practices*? Berdasarkan "Report of the Preparatory Committee for the United Nations Conference on Human Settlements" yang dipresentasikan di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), indikator *best practices* antara lain: [1] adanya dampak nyata, jelas, dan telah terbukti terhadap peningkatan kualitas hidup manusia; [2] adanya kemitraan yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan [3] adanya dampak yang berkesinambungan baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Nicholas You and Vincent Kitio, 2006)

Beberapa kata kunci dari indikator *best practices* di atas seperti kualitas hidup yang meningkat, efektivitas, dan kesinambungan menunjukkan korelasi dengan pengertian inovasi bila inovasi diterjemahkan sebagai penemuan baru. Dari hidup yang tidak berkualitas menjadi berkualitas, atau, dari sistem tidak efisien menjadi efisien menandakan adanya unsur baru. Dengan demikian, unsur baru menjadi dasar dari inovasi.

Hanya saja, pada sektor publik pengertian inovasi tidak harus menekankan adanya unsur kebaruan. Inovasi pada sektor publik juga dapat berarti perbaikan. Menjadi lebih baik tidak mesti dari sesuatu yang sama sekali baru. Untuk dianggap inovatif dalam layanan publik, misalnya, pemerintah daerah tidak mesti menemukan sesuatu yang baru. Pemerintah daerah bersangkutan telah berinovasi jika memperbaiki layanan publiknya meski dengan cara mereplikasi program/kebijakan yang sudah ada.

Apakah replikasi yang berarti menjiplak dan menyontek dibolehkan? Dalam produksi barang, sebagai contoh, segala kegiatan menjiplak dan meniru produk yang dilakukan perusahaan terhadap perusahaan lainnya adalah tindakan negatif, dikategorikan sebagai plagiat, dan melanggar hak paten. Namun, dalam kaitannya dengan kebijakan publik upaya-upaya menduplikasi dan merepetisi program/kebijakan yang dianggap lebih bagus, lebih maju, dan lebih baik merupakan tindakan positif dan karenanya harus terus didorong.

Dalam mereplikasi suatu program/kebijakan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut antara lain: [1] apakah

program inovasi tersebut sungguh-sungguh merupakan inovasi yang sudah berhasil atau terbukti; [2] apakah program inovasi dapat diadopsi atau ditransfer oleh daerah lainnya; [3] apakah daerah yang melakukan replikasi memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan program/kebijakan inovasi tersebut; dan [4] melakukan identifikasi pendekatan-pendekatan dan metodologi dalam mereplikasi praktik-praktik yang terbukti berhasil (Adriana Alberti and Guido Bertucci, 2006).

Melakukan kajian mendalam sebelum melakukan replikasi program sangat penting mengingat tidak semua program, apalagi bila program tersebut termasuk baru, yang diterapkan di suatu daerah akan cocok untuk daerah lainnya. Faktor-faktor seperti kultur, kemampuan sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan masyarakat sangat berperan penting. Penolakan masyarakat ketika pemerintah daerah memperkenalkan suatu program baru boleh jadi disebabkan adanya ketidaksesuaian budaya antara daerah asal program inovasi dengan daerah tujuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu program baru.

Pada sisi lain, faktor kesiapan sumber daya manusia, dalam arti kualitas staf pemerintahan dan anggaran replikasi juga termasuk faktor penentu berhasil tidaknya proses replikasi. Untuk kedua faktor terakhir rencana replikasi memang harus memiliki perencanaan dana yang matang. Pelatihan staf yang nantinya sebagai penanggung jawab program membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah daerah yang akan melakukan replikasi biasanya menganggarkan biaya studi banding untuk ongkos staf yang diutus mempelajari program yang akan direplikasi.

Bagaimana pemerintah daerah mendapatkan informasi tentang program inovasi dan *best practices*? Sekarang ini informasi tentang program inovasi dan *best practices* tersebut “melimpah ruah” di jejaring informasi global. Praktik-praktik cerdas dari yang berskala nasional hingga internasional akan dengan mudah diperoleh melalui buku-buku dan internet. Bahkan sejumlah lembaga baik nasional maupun internasional membuat *website* resmi yang memuat program-program inovasi.

### Otonomi Awards

Faktor paling penting yang mendorong diseminasi informasi inovasi adalah *recognition* (pengakuan), dan program pemberian *awards* merupakan salah satu bentuk pengakuan. Dari pengakuan lalu mendapatkan publikasi kemudian dipresentasikan di beberapa kegiatan seminar dan konferensi. Salah satu bukti bahwa kegiatan *awards* mempercepat proses diseminasi informasi program inovasi dari pengalaman The Institute of Public Administration of Canada (IPAC) Awards. Buku-buku hasil kegiatan IPAC Awards menyebar bukan hanya di Kanada tetapi juga di Amerika Serikat dan Jerman. Juga, artikel-artikel yang membahas hasil IPAC Awards dimuat oleh berbagai

jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Bahkan, buku *The New Public Organization* yang diterbitkan oleh IPAC akhir tahun 1999 yang terdiri atas beberapa bab tentang hasil kegiatan IPAC Awards mengalami dua kali naik cetak, versi Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris (Joseph Galimberti, 2006).

Otonomi Awards (OA) yang diselenggarakan oleh The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) juga pada koridor yang sama sebagaimana pengalaman IPAC Awards. Sejak awal FIPO berkomitmen memajukan dan membangun kabupaten-kota di Sulawesi Selatan. Caranya, FIPO menyelenggarakan ajang kompetisi antarkabupaten-kota yang dikemas dalam bentuk kegiatan penganugerahan *awards* kepada kabupaten-kota yang dianggap paling inovatif membuat program-program kerja.

Sepintas program penganugerahan *awards* terkesan hanya sejenis kegiatan “gagah-gagahan” bagi kabupaten-kota untuk pamer program-programnya. Namun bila ditelisik lebih jauh, ajang adu program kerja ini justru memberikan keuntungan bagi pemerintah kabupaten-kota karena kompetisi mendorong kemajuan daerah. Kabupaten-kota yang bersaing membuat program inovatif tidak akan melahirkan kabupaten yang “kalah” tetapi kabupaten-kota pemenang. Kenapa? Karena ajang OA mendorong daerah untuk terus-menerus membuat dan, atau, meningkatkan kualitas programnya. Bagi daerah yang meraih *awards* akan berupaya untuk sekuat tenaga mempertahankannya, sedangkan bagi daerah yang belum pernah meraih *awards* juga akan berusaha keras untuk dapat meraih *awards*.

Karena itu, kegiatan OA sangat strategis menyebarluaskan program-program inovasi dan FIPO sebagai institusi pelaksana memiliki peran penting dalam proses diseminasi informasi tersebut berdasarkan beberapa faktor. Pertama, pada puncak pemberian *awards* yang dihadiri oleh sebagian besar bupati/walikota beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing bukan saja sebagai ajang unjuk “gigi” atas prestasi yang diraih tetapi, secara tidak langsung, juga menjadi media bertukar informasi. Bukan tidak mungkin daerah yang belum berhasil menjadi peraih *awards* akan mencoba mencari informasi program peraih *awards*. Kedua, FIPO mempublikasikan secara berkala, sekali seminggu, program-program inovatif masing-masing kabupaten-kota. Publikasi melalui koran *Harian Fajar* tentu saja merupakan sarana paling efektif menyampaikan suatu program kepada masyarakat dan juga kepada daerah-daerah lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan upaya diseminasi informasi program inovasi maka FIPO berinisiatif mengemas program-program peraih OA 2010 dalam sebuah buku. Ada sepuluh program yang dianggap sebagai *best practices* pada OA 2010 yakni; *Dari Kampung Sutera ke Desa*

*Sutera (Wajo); Miliaran Rupiah untuk Sawah Tadah Hujan (Pangkep); Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui 100 KUB Perempuan (Sinjai); Penguatan Pendidikan Gratis (Gowa); Gerakan Sayang Ibu atau GSI (Palopo); Sistem Pelayanan Satu Atap atau Sintap (Parepare); Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal atau Sisduk (Takalar); e-Procurement (Luwu Utara); Pembangunan Energi Terbarukan (Enrekang); dan Kawasan Tanpa Rokok atau KTR (Enrekang)*

Semoga buku ini dapat memperkaya ide, sebagai sumber referensi, dan menjadi oase inspirasi yang akan menumbuhkan subur program-program inovatif kabupaten-kota di Sulawesi Selatan sehingga menjadi “pintu” menyemai kemajuan.

**Makassar, September 2010**  
**The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)**





## DARI KAMPUNG SUTERA KE DESA SUTERA KABUPATEN WAJO



**Parameter** : Kehidupan Ekonomi Lokal  
**Kategori** : Pertumbuhan Ekonomi Lokal  
**Isu Strategis** : Investasi dan Tenaga Kerja

### Keterlibatan Dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo
- b. Pelaku Program : Penenun Sutera
- c. Instansi yang Terlibat : Bapedalda, Perhutanan dan Perkebunan PKT)
- d. Penanggung Jawab : Kabid Perkebunan dan Kabid Perindustrian
- e. Pelaksana Program : Bidang Perkebunan dan Bidang Perindustrian
- f. Rekanan : International Labour Organization (ILO) melalui sekolah-sekolah tingkat SMP melakukan penanaman pohon murbei

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

Pelaksanaan program dimulai sejak Tahun 2002 yang tersebar di empat desa yaitu Pakanna, Nepo, Pajalele, dan Ujung Baru.

### Latar Belakang:

Industri tenun sutera telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun-temurun. Usaha ini dapat bertahan karena persaingan di industri ini masih kurang dan peluang bisnisnya sangat menjanjikan. Boleh dikata jika industri ini merupakan salah satu jenis usaha yang tidak semua daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), bahkan, di Indonesia memilikinya. Mengingat usaha ini semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak investor yang berminat menanamkan investasinya.



# Meretas Pundi Investasi di Jalur Sutera

Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau



Sejak dahulu Kabupaten Wajo dikenal sebagai daerah penghasil tenun sutera. Begitu kentalnya ikon tersebut sehingga Sengkang sebagai ibukota kabupaten yang juga terkenal dengan Danau Tempe tersebut dijuluki sebagai kota sutera.

Kemampuan Wajo mempertahankan industri ini secara turun-temurun karena sutera dalam pandangan masyarakat Wajo bukan hanya sebagai komoditi tetapi bagian yang telah terintegrasi dalam kebudayaan

agar industri  
sutera berjalan  
berkesinambungan  
dengan kualitas  
standar maka  
diadakanlah sekolah  
SMK sutera dengan  
anggaran Rp4 miliar



• • •

masyarakat Wajo khususnya dan orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Lihat saja pada setiap perayaan dan kegiatan adat, sutera selalu menjadi pakaian resmi karena nilai-nilai intrinsiknya tersebut.

Sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo meluncurkan program ini pada Tahun 2002 lalu yakni program *Dari Kampung Sutera ke Desa Sutera*, kini semakin bertumbuh, baik dari segi cakupan wilayah maupun kemajuan programnya.

Dari segi cakupan wilayah, program ini awalnya terfokus di Kampung Pakanna. Di kampung ini, industri sutera terus berkembang. Kemajuan yang dicapai ini bukan hanya karena peningkatan produksi tetapi juga peningkatan status wilayah. Atas pertimbangan tersebut, pada Tahun 2009 program ini ditingkatkan dari "kampung sutera" menjadi "desa sutera" yang terletak di empat desa sebagai basis pengembangan industri sutera yaitu Pakanna, Nepo, Pajalele, dan Ujung Baru. Perluasan wilayah program tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan produksi sutera.

Program ini menunjukkan adanya kemajuan dan perkembangan yang cukup signifikan antara Tahun 2008 dan 2009. Bila pada Tahun 2008 produksi sutera mencapai Rp1,26 miliar dengan menyerap tenaga kerja 260 orang yang tersebar di 84 unit usaha maka pada Tahun 2009 bertumbuh menjadi Rp1,64 miliar untuk produksi sutera dan menyerap tenaga kerja sebanyak 338 orang yang tersebar di 109 unit usaha. Jika dibandingkan Tahun 2008, maka pada Tahun 2009 terjadi peningkatan pada produksi sutera 30 persen, tenaga kerja 30 persen, dan unit usaha 29,76 persen.

Selain produksi sutera di empat desa sutera tersebut, secara akumulasi produksi tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATMB) sutera pada Tahun 2008 sebesar Rp19,94 miliar dengan menyerap tenaga kerja 3.324 orang yang menyebar di 233 unit usaha.



Kegiatan menenun warga Desa Pakanna

Tetapi jika melihat produksi tenun secara akumulatif, baik sutera maupun non sutera juga memperlihatkan hasil yang mengembirakan. Pada Tahun 2008 saja, produksi tenun mencapai Rp33,56 miliar dengan menelan investasi senilai Rp6,77 miliar dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 19.596 orang yang tersebar di 6.789 unit usaha.

Peningkatan ini sangat spektakuler mengingat ketersediaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat yang selama ini terbelang masih minim. Guna mengatasi masalah ini, pemerintah daerah (pemda) menganggarkan kurang lebih Rp100 miliar untuk pengadaan infrastruktur khususnya perbaikan jalan yang menghubungkan antarwilayah di Wajo. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan akan mendukung keberlanjutan berbagai program, terutama industri tenun.

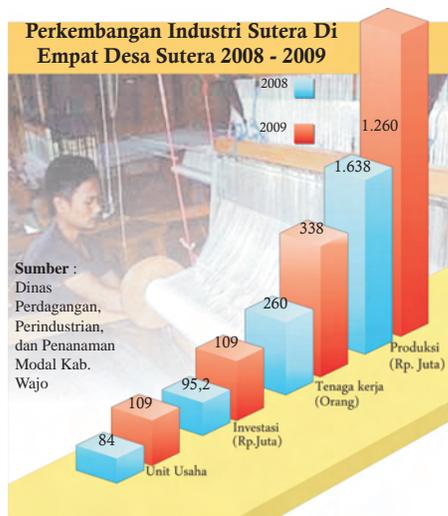
Jika pekerjaan jalan semuanya rampung, maka dapat dipastikan frekuensi arus barang ke dan dari daerah sutera semakin cepat dan berdampak terhadap meningkatnya investasi sehingga mendorong

bertambahnya uang beredar dan secara otomatis juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain upaya tersebut, pemda juga membuat berbagai terobosan baru diantaranya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Atas kerjasama ini, Pemkab Wajo mendapatkan bantuan dana sebesar Rp5 miliar.

Upaya lain yang dilakukan berupa pembuatan pusat promosi sutera sebagai ajang memperkenalkan produk kepada konsumen atau investor yang ingin menanamkan modalnya ke industri ini.

Agar industri sutera



Gambar 1. Industri Sutera di Empat Desa Sutera Tahun 2008 dan 2009

berjalan berkesinambungan dengan kualitas standar maka diadakanlah sekolah SMK sutera dengan anggaran Rp4 miliar dan pusat pelatihan industri dengan anggaran Rp3,5 miliar yang telah dicanangkan Gubernur Sulsel pada 9 November 2009 lalu. Selain itu, pihak pemda juga merencanakan pembangunan gedung desain dan gedung pencelupan benang sutera senilai Rp1,5 miliar. Rencana itu telah disampaikan ke Departemen Perindustrian untuk mendapatkan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perhatian pemda tidak hanya tertuju pada pengadaan sarana saja tetapi juga pada pemberdayaan industri sutera itu sendiri dan dampak pengolahannya. Dalam program pemberdayaan industri sutera, pemda mengucurkan dana bergulir sebesar Rp500 juta yang digunakan untuk pengembangan usaha. Sedang perhatian pemda pada penanggulangan dampak lingkungan dalam bentuk penghijauan pesisir danau dengan menanam pohon trembesi yang bermanfaat untuk mengatasi pencemaran limbah celup sutera di sepanjang pesisir Danau Tempe dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dukungan pemda terhadap pengembangan program diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati No.154/KPTS/VI/2000 tentang Tim Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam Kabupaten Wajo dan Keputusan Bupati No.43/KPTS/XII/2007 tentang Pembentukan *Silk Solution Centre* (SSC) Persuteraan Alam Wajo.

Dari berbagai bentuk kebijakan yang diambil menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah setempat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Komitmen itu bukan hanya tercermin dari berbagai upaya penguatan program melainkan juga pada upaya peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan. Dengan upaya ini, masyarakat dan Pemkab Wajo dapat meretas pundi-pundi investasi dan meningkatkan nilai ekonomi di industri yang menggiurkan tersebut. (andimattinragau@yahoo.com)



# MILIARAN RUPIAH SAWAH TADAH HUJAN

KABUPATEN PANGKEP



**Parameter** : Kehidupan Ekonomi Lokal  
**Kategori** : Pemerataan Ekonomi Lokal  
**Isu Strategis** : Sarana dan Prasarana

## Keterlibatan Dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pangkep
- b. Pelaku Program : Petani Sawah Tadah Hujan
- c. Instansi yang Terlibat : PU, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
- d. Penanggung Jawab : Kabid Sarana dan Prasarana
- e. Pelaksana Program : Bidang Sarana dan Prasarana
- f. Rekanan : Konsultan

## Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan program dimulai sejak Tahun 2006 yang tersebar di 8 dari 12 kecamatan.

## Latar Belakang

Areal sawah tadah hujan (STH) di Kabupaten Pangkep seluas 6.413 hektar atau 40 persen dari 16.007 hektar dari keseluruhan luas sawah. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi petani pemilik STH adalah tingkat ketergantungan yang tinggi pada air hujan.



# Mengail Asa di Sawah Tadah Hujan

Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau



Kendati areal sawah tadah hujan (STH) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terbilang luas, namun tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai upaya telah dilakukan pemda guna mewujudkan maksud tersebut, diantaranya pengadaan sarana penunjang ketersediaan air, alat mesin pertanian (alsintan), pembuatan jembatan tani, dan pemberian benih unggul kepada petani.

Pertama, upaya pemda memberikan jaminan ketersediaan air dilakukan melalui beberapa terobosan seperti pembangunan dan rehabilitasi saluran air/irigasi yang menelan anggaran Rp1,68 miliar, pembuatan saluran air perpipaan sebesar Rp5,44 miliar, pembuatan sumur bor Rp618,5 juta, dan pembuatan embung Rp99,8 juta.

Kedua, pengadaan alsinta pada Tahun 2009 yang menelan anggaran Rp1,42 miliar untuk pembelian *hand tractor* besar dan kecil sebanyak 10 unit, serta pompa air ukuran 8 inci sebanyak 10 unit, dan pompa air ukuran 2 inci sebanyak 76 unit.

Ketiga, pengadaan jembatan tani yang merupakan kebutuhan yang sudah lama ditunggu-tunggu petani karena sangat menentukan lancarnya kegiatan pengangkutan hasil-hasil pertanian, terutama padi. Pembuatan jembatan tersebut menelan anggaran Rp126 juta yang berlokasi di Desa Tondongkura.

Keempat, pemberian bantuan benih padi unggul kepada petani. Bantuan ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas jenis/varietas unggul yang dihasilkan agar mutu padi lebih baik dan produksinya meningkat.

Keseluruhan terobosan tersebut menelan anggaran sebesar Rp9,4 miliar. Besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia karena dalam beberapa hal sudah mulai terasa manfaatnya. Misalnya, jika sebelumnya masa tanam hanya satu hingga dua kali setahun, sekarang petani bisa panen hingga lima kali dalam dua tahun. Dengan memanfaatkan lahan pertanian seluas 16.007 hektar, produksi padi di Pangkep mengalami peningkatan di atas lima persen pada 2008 dan 2009.

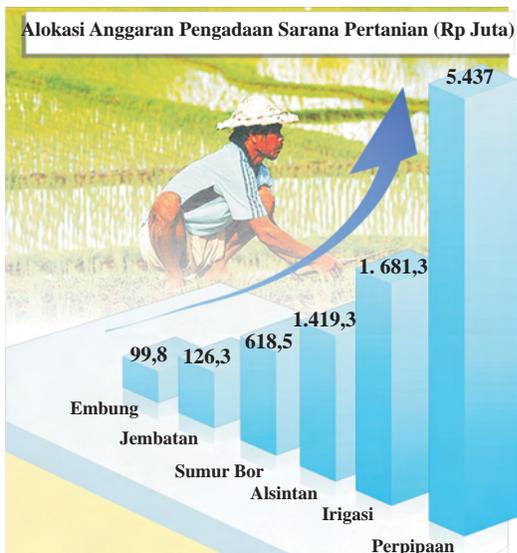
**kebijakan pemda dalam mengatasi permasalahan air membuat petani sejak Tahun 2008 sudah dapat menggarap sawahnya sesaat setelah panen karena ketersediaan pasokan air yang sudah terjamin**

• • •

Pada Tahun 2008, produksi padi mencapai 123.427 ton atau meningkat 10,52 persen dibandingkan Tahun 2007 dengan produksi sebesar 110.440 ton. Demikian juga Tahun 2009 produksi padi mencapai 132.245 ton atau mengalami peningkatan 7,14 persen dari Tahun 2008.

Peningkatan ini merupakan buah dari kerja keras untuk memenuhi capaian yang disyaratkan pemerintah pada kisaran 5 persen terhadap peningkatan produksi padi tiap tahunnya.

Atas berbagai kebi-



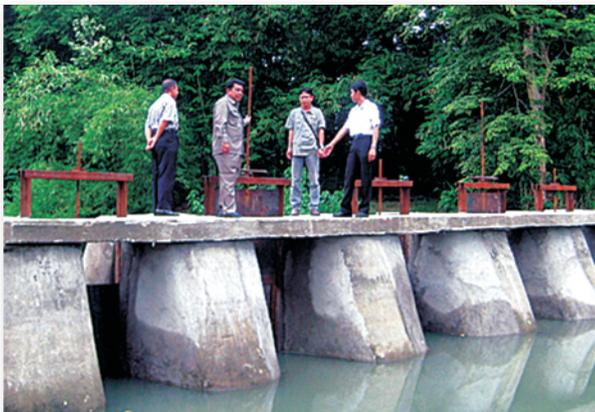
Gambar 2.

Alokasi Anggaran Pengadaan Sarana Pertanian Kab. Pangkep Tahun 2009

jakan pemda dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka pada Tahun 2008 petani di Kecamatan Pangkajene, Minasa Tene, Bungoro, dan Labakkang sudah dapat menggarap sawahnya sesaat setelah panen karena ketersediaan pasokan air yang sudah terjamin.

Dalam program ini juga dilibatkan konsultan yang bertindak sebagai pengarah bagi para petani yang memungkinkan program berjalan sesuai dengan harapan. Dengan melibatkan konsultan setidaknya dapat berperan sebagai pemberi solusi bagi para petani jika sewaktu-waktu menemui kendala dalam meningkatkan produksi padinya.

Keberhasilan Pangkep meningkatkan produksi padi tidak hanya tertumpu pada jaminan ketersediaan air, pengadaan alsintan, dan pemberian



Irigasi untuk mengairi sawah tadah hujan di Labakkang

bibit saja, tetapi juga menjaga kualitas tanah melalui pemberian pupuk organik yang terbuat dari jerami. Bahan ini banyak tersedia terutama pasca panen.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga melakukan kerjasama dengan Prima Tani Kabupaten Pangkep dalam kegiatan produksi pupuk kompos jerami. Secara teknis, alat pengolah jerami disiapkan oleh Dinas Pertanian, sedangkan teknologi pembuatan kompos dan cara aplikasinya difasilitasi oleh tim dari Prima Tani. Alat pengolah jerami/pencacah ini telah diberikan kepada beberapa ketua gabungan kelompok tani (gapoktan).

Penerapan metode ini lambat laun dapat memperbaiki unsur hara tanah sehingga produksi padi dapat berkesinambungan. Jadi petani yang tadinya tidak mengolah sawahnya karena faktor unsur hara, kini tetap mengolahnya setiap selesai musim panen.

Atas berbagai upaya dan terobosan ini, petani yang tersebar di Pangkep mendapatkan nilai tambah dari kesinambungan dan peningkatan produksi padi sehingga berdampak juga pada peningkatan pendapatan mereka secara merata. ([andimattingaragau@yahoo.com](mailto:andimattingaragau@yahoo.com))



## PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI 100 KUB PEREMPUAN KABUPATEN SINJAI



**Parameter** : Kehidupan Ekonomi Lokal  
**Kategori** : Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Pengentasan  
Kemiskinan

**Isu Strategis** : - Potensi dan Problem Ekonomi Lokal  
- Ekonomi Lemah dan Ekonomi Lokal

### Keterlibatan Dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  
Penanaman Modal
- b. Pelaku Program : Kaum perempuan dan pelaku IKM
- c. Instansi yang Terlibat : Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas  
Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Bappeda
- d. Penanggung Jawab : Kepala Sub Dinas Usaha Perindustrian
- e. Pelaksana : Sub Dinas Usaha Perindustrian
- f. Rekanan : CV. Andhika Putra, CV. Buana Mandiri Jaya,  
CV. Rizal Putra

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan program dimulai Tahun 2008 - 2013 di seluruh kecamatan

### Latar Belakang

Beberapa hal yang mendorong pelaksanaan program ini,  
diantaranya :

- Rendahnya nilai ekonomis komoditi agro pada musim panen raya
- Rendahnya peran perempuan dalam upaya peningkatan  
usaha kecil
- Pola tanam masyarakat masih berbasis pertanian  
tradisional (perlu agro industri)
- Rendahnya semangat kewirausahaan, penerapan iptek  
dan keterampilan



# Berdayakan Ekonomi dengan Potensi Lokal

Laporan: Andi Mattingaragau Tenrigau



Tidak banyak pemerintah daerah (pemda) melibatkan perempuan dalam program-program kerjanya. Satu dari sedikit pemda tersebut adalah Kabupaten Sinjai melalui program "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui 100 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perempuan dan IKM Berbasis Potensi Lokal". Kaum perempuan dalam program ini dibuat lebih berdaya dan mandiri dengan pendekatan konsep *entrepreneurship*. Konsep ini sangat tepat diterapkan karena sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan yang kaya akan potensi sumber daya alam.

Tidak salah lagi jika petikan syair lagu "bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala dapat menghidupimu" untuk mengilustrasikan betapa kayanya negeri ini. Bukan hanya hasil tambangnya, tetapi juga keanekaragaman hayati yang tumbuh di atasnya.

Jika ditilik secara geografi dan morfologi, Sinjai yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan dengan medan berbukit, bergelombang hingga bergunung sekitar 85 persen, sangat cocok untuk pengembangan usaha agro industri. Program 100 KUB Perempuan merupakan program yang melibatkan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan.

Secara substantif, pelaksanaan program 100 KUB Perempuan sangat relevan dengan upaya pemda untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal, baik dari segi rekrutmen tenaga kerja yang diambil dari daerah setempat maupun pada kebutuhan dasar bahan baku pengembangan produk, seperti umbi-umbian dan buah-buahan. Melalui program ini, kaum perempuan mengembangkan usaha dengan menghasilkan berbagai produk seperti kripik pisang, kripik ubi, *squash* (sari buah yang dicampur air), dan sari manis. Pemasaran produk umumnya masih terkonsentrasi di Sinjai.

Kendati terbilang baru, produk ini diminati konsumen. Selain harganya terjangkau, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk sejenis lainnya. Ini karena pembuatan produk dilakukan melalui proses sesuai standar prosedural yang telah ditetapkan. Diawali dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, seleksi material, pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Agar dikenal lebih luas, produk ini dikemas dengan pengepakan dan pemberian label sesuai dengan kelompok usaha masing-masing.

Selain 100 KUB Perempuan, pemda juga mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kedua program tersebut saling mendukung satu sama lain. Pada kedua sub program itu, khususnya dalam proses produksi produk seperti pembuatan kopi borong di Desa Bonto Tangnga dan pembuatan produk kemasan markisa di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat yang mana seluruh anggotanya adalah perempuan.

• • •  
jika memperhatikan terobosan program, nampaknya pemda serius dan tidak main-main. Pada 2008 dan 2009, budget yang dikeluarkan sebesar Rp6,7 miliar. Dana inilah yang dijadikan biaya operasional dan pengembangan program

disko, tenteng, dan kue kurma. Ada juga minuman seperti kopi borong (bubuk), markisa (cair), *virgin coconut oil* (vco), dan susu sinjai (susin-kemasan gelas).

Jenis lainnya adalah hasil kerajinan, antara lain kursi dan meja tamu, tempat tisu, asbak, pot bunga, tempat pulpen, tempat kado, tempat sendok, toples, baki, keranjang, bingkai foto, gelas, cangkir, asbak, timba, pot bunga, rajukan bundar, dan berbagai produk lainnya. Keseluruhan produk ini ada dalam bentuk motif pakis, berbahan tempurung, dan berbahan bambu.

Jika memperhatikan terobosan program, nampaknya pemda serius dan tidak main-main. Pada 2008 dan 2009, *budget* yang dikeluarkan sebesar Rp6,7 miliar. Dana inilah yang dijadikan biaya operasional dan pengembangan program.

Pelaksanaan program diawali pada 2008 dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi program dengan memfasilitasi pembentukan 100 KUB Perempuan yang dilanjutkan dengan pemagangan di Malang dan pelatihan di Balai Besar Industri Bogor, serta pelatihan teknis bagi anggota kelompok.

Pada Tahun 2009, dilakukan pengadaan peralatan kerja penyari buah dan *squash* kemudian menyerahkannya ke kelompok dan dilanjutkan dengan pelatihan manajemen usaha bagi pendamping dan pelatihan bagi kelompok.

Hasilnya, kerja keras yang dilakukan selama ini berbuah manis. Bukan hanya pada pendapatan kaum perempuan dan IKM semata, tetapi juga meraih berbagai penghargaan pada ajang tingkat provinsi dan nasional.

Program pemberdayaan perempuan melalui 100 KUB dipandang berhasil.

Pembauran produk 100 KUB perempuan dan IKM bukan hanya dalam proses pembuatan produk saja tetapi juga pada pemasarannya. Di beberapa tempat, kedua jenis hasil produk industri tersebut dipajang dalam satu tempat penjualan.

Hal ini dapat dilihat di *outlet* Kabupaten Sinjai di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kedua hasil jenis produk industri tersebut di pajang bersama-sama. Produknya pun bervariasi seperti jenis makanan yang terdiri dari poto-poto, bembeng, kacang



Kaum perempuan sedang membuat berbagai jenis panganan

Dengan melibatkan kaum perempuan yang menembus angka signifikan sekitar 2.500 orang atau 25 orang per kelompok, juga menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan kaum perempuan yang langsung terlibat dalam proses membuka dan pengembangan usaha baru. Kini kaum perempuan dan pelaku IKM di Kabupaten Sinjai bisa lebih kreatif dalam mengembangkan usaha mereka. Apalagi program ini didukung penuh pemda dengan mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya :

1. Keputusan Bupati No. 275 Tahun 2008 Tanggal 24 April 2008 tentang KUB Bontotangga Sebagai Penerima Bantuan Gedung Pengolahan Kopi Bubuk.
2. Keputusan Bupati Sinjai No. 343 Tahun 2008 Tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Seratus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pengolahan Buah-Buahan dan Umbi-Umbian.
3. Surat Keputusan Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan No.003/PPK/SP/P3M/2008 Tanggal 8 Nopember 2008 (Surat Kepada Direktur V Andhika Putra).
4. Keputusan Bupati Sinjai No. 188 Tahun 2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pembentukan Pembina dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Sinjai Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Sinjai No. 3 Tahun 2009 Tanggal 9 Pebruari 2009 Tentang Aksi Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Sinjai

Kedua jenis sub program tersebut tidak hanya berdaya pada kelompok mereka karena adanya dukungan penuh dari Pemkab Sinjai, tetapi juga mempunyai *multiflier effect* bagi munculnya petani-petani baru untuk menanam umbi-umbian, pisang, nenas, nangka, dan lain-lain.

Hanya saja, tantangan yang dihadapi kaum perempuan dan pelaku IKM selama ini masih terletak pada sulitnya merubah *mindset* (pola pikir) anggota kelompok yang masih menganut pola agraris untuk diarahkan ke pola agro industri Kendati demikian, lambat laun *mindset* ini akan berubah secara berangsur seiring dengan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus.

Ke depan, program ini akan tetap berjalan karena merupakan program tetap yang sudah diparmanenkan dalam rencana strategis pengembangan industri kecil yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang karena dipandang dapat memberikan manfaat bagi pelaku program dan dianggap dapat memberikan nilai tambah ekonomi. ([andimattingaragau@yahoo.com](mailto:andimattingaragau@yahoo.com))



## PENGUATAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN GOWA



**Parameter** : Layanan Publik  
**Kategori** : Layanan Pendidikan  
**Isu Strategis** : Manajemen dan Sistem Pendidikan

### Keterlibatan Dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Pendidikan
- b. Pelaku Program : Para pendidik di Sekolah SD, SMP, SMA,  
Satpol PP Pendidikan
- c. Instansi yang Terlibat : Dinas Pendidikan
- d. Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan
- e. Pelaksana Program : Dinas Pendidikan

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program penguatan pendidikan gratis mulai dilaksanakan sejak Tahun 2008 dan dilaksanakan sebagai program kabupaten

### Latar Belakang

Pendidikan gratis bukan hal baru di Sulawesi Selatan. Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan sektor pendidikan tersebut telah dicanangkan sejak Tahun 2005 untuk tingkat provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten-kota waktu pencanangannya berbeda-beda. Di Kabupaten Gowa, misalnya, program pendidikan gratis dimulai sejak 2008. Sejak itu, berbagai kebijakan baru di bidang pendidikan terus bergulir di kabupaten yang menjadi penyangga Kota Makassar tersebut. Contohnya, kebijakan terhadap guru yang mencoba menyiasati dan melenceng dari aturan pendidikan gratis. Bila ditemukan guru demikian maka guru bersangkutan dapat saja langsung dibebastugaskan atau dimutasi ke tempat kerja yang baru.



# Menggali Nilai Kecerdasan Lokal di Bumi Rewako

Laporan: Milawaty



**B**egitu pintu kelas terbuka, tubuh-tubuh mungil berseragam putih merah berhamburan keluar dengan tertib. Riu rendah senda gurau khas anak-anak terdengar dari siswa kelas lain yang ikut berbaur bersama mereka menuju pintu gerbang sekolah. Pada bagian atas pintu kelas mereka nampak dua penggalan kata yang ditulis dengan huruf besar, Punggawa D' Emba. Kedua penggalan kata ini diambil dari nama program pendidikan Punggawa D' Emba Education Program yang disingkat PDEB.

Program PDEB merupakan salah satu program pendidikan unggulan di Kabupaten Gowa yang dikemas secara lokal. PDEB adalah program lokal namun sarat dengan muatan nasional yang diterapkan pada empat mata pelajaran inti yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia, serta muatan lokal. Pada metode ini, setiap sekolah mempersiapkan satu ruangan khusus (*cinema class*) yang diperuntukkan bagi siswa kelas IV, V, dan VI secara bergantian sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di dalam ruangan, siswa mendapatkan pelajaran secara audi visual.

Program ini, menurut pengakuan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan di Gowa, dapat menstimulus daya nalar dan daya kritis siswa sekaligus menghilangkan kecanggungan mereka dalam mengungkapkan dan menjelaskan apa yang telah dipelajari di depan kelas. PDEB juga menggali nilai kecerdasan lokal dengan belajar memahami makna *Akkorongtigi* atau *Angngaru*. Melalui PDEB ini metode menghafal sedikit demi sedikit akan dihilangkan dan mengacu pada pemahaman materi sehingga daya serap siswa dapat ditingkatkan. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Gowa meyakini daya serap siswa setelah diterapkannya program ini mampu mencapai 80 persen.

Sebelum program ini diterapkan, para guru diikutkan dalam pelatihan guru Revolusi Metodologi Pembelajaran ala Cinema Edutainment. Dengan kucuran anggaran sekitar Rp2 miliar, 20 sekolah yang mencakup delapan sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan enam sekolah menengah atas (SMA) telah menerapkan PDEB. Ke depan, jika program ini berhasil, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan akan menambah kembali jumlah sekolah pelaksana PDEB.

Bukan hanya PDEB yang menjadi penguat pendidikan gratis di kabupaten ini, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Wajib Belajar yang merupakan lanjutan Perda Pendidikan Gratis, adalah terobosan lainnya. Dalam perda tersebut, orangtua yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya akan diancam hukuman penjara enam bulan atau denda Rp50 juta. Sanksi yang tegas dan mengikat memang diperlukan untuk menjamin tegak



**para siswa diberikan satu topik tertentu untuk dibaca dan didiskusikan. Setelah itu, salah seorang dari mereka akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan**



dan berjalannya peraturan, terlebih lagi peraturan mengenai pendidikan yang nota bene merupakan salah satu program utama Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun demikian, untuk tahap pertama Pemkab Gowa masih akan melakukan sosialisasi sampai 2010 sebelum penerimaan siswa baru (PSB). Usai PSB Tahun 2010, maka perda tersebut akan diberlakukan secara efektif. Untuk melancarkan pelaksanaan perda tersebut, dinas pendidikan akan membangun ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB). Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar diberlakukan.

Selain PDEB, daerah yang kental dengan jargon Rewako juga mengadopsi metode pembelajaran di Jepang dan Finlandia. Metode belajar tersebut meliputi pengembangan *skill* siswa didik dalam hal membaca, diskusi, dan audiensi. Pada metode ini, jadwal masuk sekolah dimajukan 15 menit. Jika dulu siswa masuk pada pukul 07.30, maka dengan diaplikasikannya metode ini ke seluruh sekolah, maka jam masuk siswa bergeser menjadi pukul 07.15. Pada 10 menit pertama sebelum pelajaran di mulai, para siswa diberikan satu topik tertentu untuk dibaca dan didiskusikan. Diskusi tidak terlepas dari mata pelajaran yang ada di kurikulum sekolah. Setelah itu, salah seorang dari mereka akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Hal tersebut berulang setiap hari sehingga seluruh siswa mendapatkan giliran. Dengan metode ini siswa memiliki keberanian untuk mengeluarkan pendapat di hadapan banyak orang dan juga belajar menghargai pendapat orang lain. Metode ini diterapkan mengingat selama ini pola pembelajaran siswa sebagian besar diisi oleh metode penghapalan guna mengejar tingkat kelulusan. Diharapkan metode ini mampu menstimulus kemampuan daya pikir dan nalar anak dalam membedah dalam memahami bagaimana substansi pelajaran itu sesungguhnya.

Pemerintah daerah juga mendisiplinkan siswa dan pendidik melalui bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pendidikan. Kegiatan yang pertama kali dibentuk awal Tahun 2009 pada awalnya hanya di tingkat sekolah dasar. Pada awal Tahun 2010 semua jenjang pendidikan telah memiliki Satpol PP Pendidikan. 130 orang Satpol PP Pendidikan dipersiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ini. Guru-guru yang rumahnya berjarak lebih dari 1,5 kilometer dari sekolah akan mendapatkan fasilitas gratis antarjemput. Perlakuan antarjemput tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi tingkat keterlambatan dan ketidakhadiran tenaga pendidik.

Tugas Satpol PP Pendidikan tidak hanya itu. Mereka juga melakukan razia anak sekolah yang berkeliaran di luar area sekolah pada jam sekolah.



Kelas tematik yang mengadopsi metode pembelajaran Jepang dan Finlandia



Guna kelancaran kegiatan, pemerintah daerah membuka akses ke 0811414222 atau 0811417240 bagi masyarakat yang ingin melaporkan lokasi-lokasi favorit yang kerap dijadikan tempat membolos siswa. Semua kebijakan-kebijakan tersebut di atas tidak lain agar mutu pendidikan menjadi jauh lebih baik sehingga kelak kelulusan siswa dapat lebih dipertanggungjawabkan. Siswa tidak sekadar lulus, namun mereka membawa ilmu yang dapat ditransfer ke tempat dan ke individu lainnya.

**(m\_milawaty@yahoo.com)**



## GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

KOTA PALOPO



**Parameter** : Layanan Publik  
**Kategori** : Layanan Kesehatan  
**Isu Strategis** : Sistem Perlindungan Kesehatan  
Partisipasi Penyelenggaraan Layanan Kesehatan

### Keterlibatan Dalam Program

- a. Leading Sector : Dinas Kesehatan
- b. Pelaku Program : Satgas GSI tingkat kecamatan dan kelurahan, Dukun, Warga tiap kecamatan, Ketua Forum LPMK Kecamatan
- c. Instansi yang Terlibat : Dinas Pendidikan, Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan
- d. Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan
- e. Pelaksana Program : Dinas Kesehatan
- f. Rekanan : Pengusaha SPBU, pengusaha rumah makan dan hotel

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program GSI merupakan program nasional *multiyears* yang telah dilaksanakan sejak dicanangkannya pada Tahun 1996.

### Latar Belakang

Kematian ibu maternal dan bayi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat. Merubah kebiasaan masyarakat yang masih menggantungkan persalinan pada dukun menjadi salah satu hal tersulit. Budaya “sudah biasa” yang selama ini melekat menyebabkan ibu hamil merasa lebih nyaman dan aman menyerahkan proses persalinan mereka ke tangan dukun. Padahal, data tingkat kematian ibu maternal di Kota Palopo pada Tahun 2007 mengalami lonjakan dari 17 kasus ke 25 kasus. Olehnya, dibutuhkan pihak ketiga yang dapat berperan sebagai agen perubahan, merubah ketergantungan pada dukun dan mengurangi tingkat kematian ibu maternal.



# Mencabut Akar Kematian di Kota Idaman

Laporan: Milawaty



Endang (32 tahun) terus meringis. Sentakan-sentakan janin di perutnya semakin lama semakin kencang. Bayi yang sudah sejak lama dinantikannya tidak lama lagi akan lahir. *Sanro* (dukun) tua yang sedari tadi siap mengantarnya membenahi kembali ujung kerudung yang terlihat sudah kusam. Sementara suami Endang yang sengaja pulang lebih cepat dari kantor terus mendampingi sang istri. Tidak ada mobil yang dapat digunakan ke puskesmas. Suami Endang hanya memiliki sepeda motor butut yang tidak memungkinkan digunakan bertiga. Beruntung, ada tetangga mereka yang bersedia mengantar ketiganya dengan mobil.

Gambaran di atas menunjukkan betapa si ibu dalam mempersiapkan proses kelahiran membutuhkan peran serta, keaktifan, dan ketanggapan dari orang-orang di sekitarnya; suami, *sanro*, maupun tetangga. Gerakan Sayang Ibu (GSI), istilah yang tepat ditujukan untuk menunjukkan kesiagaan suami, keluarga, dan warga dalam menjaga ibu hamil dan melahirkan.

Sejatinya, GSI merupakan program nasional yang dicanangkan di Indonesia sejak Tahun 1996 yang bertujuan untuk menekan tingkat kematian ibu dan bayi. Kematian ibu maternal dan bayi memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan warganya. Merubah paradigma masyarakat yang masih menggantungkan persalinan ke dukun menjadi salah satu hal tersulit. Budaya “sudah biasa” yang selama ini melekat menyebabkan ibu hamil merasa lebih nyaman dan aman menyerahkan proses persalinan mereka ke tangan dukun. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga sebagai agen perubahan.

Faktor lainnya adalah terbatasnya akses terhadap pelayanan persalinan. Hal ini diperparah oleh lemahnya posisi perempuan di lingkungan masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kesehatan reproduksinya. Di banyak daerah perempuan sulit memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya dan bayi yang dikandung. Jadi, saat mengalami pendarahan atau komplikasi saat kehamilan, suami atau tetua adat yang memutuskan kapan dan di mana ia akan dirawat.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan jumlah kematian ibu maternal adalah Kota Palopo. Di kota tua bersejarah ini, terhitung 42 nyawa ibu melayang sia-sia dalam kurun waktu 2006-2007. Belajar dari pengalaman pahit tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo merangkul semua agen perubahan untuk bersama-sama menciptakan *zero death* di tahun berikutnya. Penjabaran program GSI disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayah, kreativitas, inovasi, dan karya yang juga melibatkan semua komponen masyarakat.

Sebagai langkah awal, pemkot yang terdiri atas walikota dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait turun tangan dengan



Salah satu Pondok Sayang Ibu yang difungsikan sebagai rumah tunggu sementara bagi ibu yang akan melahirkan (kiri) Murid-murid di Kota Palopo menyanyikan mars GSI (kanan)

melakukan siaran langsung menyebarkan informasi GSI di beberapa radio swasta lokal. Penyebaran melalui media lokal ini tidak hanya dilakukan sekali mengingat efektivitas program harus didukung dan dijabarkan dalam bentuk tindakan secara terus menerus, bukan hanya dari jajaran pelaksana tugas melainkan semua unsur dari agen perubahan itu sendiri.

Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) juga diberdayakan sebagai alat sosialisasi sekaligus alat informasi GSI dengan cara membuat buletin, klipring, berdiskusi, dan memberikan informasi.

Di tingkat kecamatan, program GSI juga diperkuat. Tugas pokok mereka adalah menghimpun data tentang ibu hamil dan bersalin, memberikan penyuluhan, dan mengumpulkan dana untuk ambulans desa serta tabungan ibu bersalin. Salah satu hal yang menarik, di beberapa kecamatan, para ketua satuan petugas (satgas) GSI dan pengurus inti di semua kelurahan di dominasi kaum bapak yang berarti adanya pelibatan kaum lelaki dalam gerakan ini. Keterlibatan mereka tentunya diharapkan berujung pada kepedulian kepada kaum ibu.

Agen perubahan lainnya adalah *sanro* atau dukun. *Sanro* di Palopo pun dirangkul dan dilibatkan dalam proses persalinan bayi. *Sanro* tidak dilihat sebagai kompetitor, tetapi dijadikan mitra bidan.

Langkah berikutnya, satgas GSI bekerja sama dengan pelatih senam khusus ibu-ibu hamil. Tujuannya tidak lain agar kesehatan ibu hamil dapat terus terjaga dan terpantau. Satgas GSI juga membentuk kelompok keluarga sadar hukum GSI yang anggota-anggotanya terdiri dari kelompok dasawisma, karang taruna, remaja masjid, dan remaja gereja. Selain itu partisipasi warga dalam GSI juga ditingkatkan melalui pembentukan Pondok Sayang Ibu yang dapat digunakan oleh ibu hamil yang waktu melahirkannya sudah dekat sementara jarak rumahnya jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Pondok Sayang Ibu menjadi salah satu alternatif tempat tinggal sementara.

Beberapa upaya lainnya adalah membuat kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara satgas GSI dengan beberapa pelaku bisnis guna mendukung GSI. Salah satu poin kerjasama tersebut adalah pengusaha dengan biaya sendiri memasang brosur imbauan dan spanduk GSI di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para pelanggan. Bahkan, Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum (SPBU) juga tidak luput dari

pengamatan satgas GSI. Di tempat ini satgas menyediakan kotak amal GSI yang diletakkan di lokasi strategis yang memudahkan pengendara melihatnya.

Selain itu satgas juga membentuk ojek dan becak GSI untuk mengantar ibu hamil. Tidak hanya itu, warga setiap kelurahan pun dengan sukarela menyiapkan kendaraan untuk ibu hamil sekaligus menjadi donor darah siaga.

Tak berhenti sampai di situ, Kepala KUA dan Ketua forum LPMK kecamatan bekerja sama membentuk *triangle lovely* (kasih sayang tiga sisi) yaitu pelaminan menuju GSI. Pada program ini, setiap pasang pengantin yang memiliki tingkat perekonomian yang memadai akan diminta partisipasinya membantu program GSI. Tak ada nominal khusus. Semuanya tergantung kerelaan pasangan.

Dunia pendidikan juga disasar oleh satgas GSI dengan ditandatangani MoU kerjasama dengan tiga sekolah tinggi ilmu kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Pemahaman dini GSI di berbagai sekolah, terutama di sekolah dasar juga diperkenalkan. Peran serta sekolah, terutama sekolah dasar, dalam mendukung program GSI terlihat nyata karena mulai dari pintu masuk, tembok sekolah, hingga pintu kelas terpasang spanduk dan pamflet GSI. Kerjasama tersebut juga terlihat dari kesediaan para guru menjelaskan GSI kepada murid sebelum pelajaran di mulai. Bahkan beberapa guru dengan antusias menciptakan lagu Sayang Ibu yang rencananya kelak akan digunakan sebagai lagu mars GSI Palopo.

.....  
*Kami putra dan putri Palopo  
Sayang ibu menjadi tekadku  
Walaupun apapun jadi tantangan  
Sayang ibu takkan luntur*  
.....

Langkah besar lainnya adalah pemerintah kota memperkuat regulasi kesehatan melalui terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Sehat yang merupakan perda kota sehat pertama di Indonesia.

Kerjasama harmonis antarpemerintah kota, pemerintah kecamatan, agen perubahan, dan masyarakat tidak sia-sia. Terbukti angka kematian ibu yang lekat dengan jargon Kota Idaman ini dapat ditekan secara drastis. Hasilnya, kota berpenduduk 141.996 jiwa ini berhasil menekan angka kematian ibu dari 25 orang Tahun 2007 menjadi empat orang di Tahun 2008 dan akhirnya *zero percent* kematian ibu maternal pada Tahun 2009. Tepatlah kata pepatah Bugis *iya ada iya gau* yang berarti satu kata satu perbuatan. GSI di Palopo bukan hanya pada ucapan tapi juga pada perbuatan.  
([m\\_milawaty@yahoo.com](mailto:m_milawaty@yahoo.com))



## **SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP (SINTAP)**

KOTA PAREPARE



- Parameter** : Layanan Publik  
**Kategori** : Pelayanan Administrasi Dasar Kependudukan dan Perizinan  
**Isu Strategis** : Aksesibilitas Layanan Jaminan Keadilan dan Sistem Pelayanan

### **Keterlibatan dalam Program**

- a. Leading Sector : Kantor Sintap  
b. Pelaku Program : Pegawai Kantor Sintap  
c. Instansi yang Terlibat : Lintas Sektor/SKPD terkait  
d. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Sintap  
e. Pelaksana Program : Kantor Sintap

### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan program dimulai sejak Tahun 2001 di Parepare

### **Latar Belakang**

Sejak dahulu Kota Parepare dikenal memiliki intensitas perniagaan dan jasa yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Parepare merespons hal tersebut dengan membentuk sistem pelayanan perizinan yang cepat dan transparan sehingga dapat mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan usahanya.



# Pelayanan yang Ramah Pelanggan

Laporan: Sundari Usman



Mendapatkan pelayanan maksimal, disambut ramah oleh petugas, didampingi petugas sampai urusan selesai, umumnya hanya bisa kita nikmati di kantor-kantor pelayanan swasta. Tetapi itu dulu. Kini, kenyamanan dan keramahtamahan seperti itu juga bisa kita rasakan di sejumlah kantor instansi pemerintah, misalnya di Kantor Sistem Pelayanan Satu Atap (Sintap) Parepare.

Di kantor yang melayani berbagai jenis perizinan tersebut masyarakat tidak akan menjumpai suasana membosankan sebagaimana banyak ditemui di kantor-kantor instansi pemerintah lainnya. Begitu masuk, masyarakat akan langsung disambut dengan ramah oleh petugas dan mendapatkan pendampingan dari petugas sampai keperluannya selesai. Hal ini demi memperbaiki mutu layanan guna mengimplementasikan visi kantor tersebut yakni *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berstandar Internasional*.

Kantor Sintap Parepare dalam melakukan pelayanan mengacu pada tujuh prinsip, yakni: [1] **kesederhanaan**, prosedur pelayanan tidak berbelit belit; [2] **kejelasan**, persyaratan, waktu, prosedur dan biaya dipajang secara terbuka sehingga mudah diketahui masyarakat; [3] **kepastian waktu**, waktu pelayanan mulai satu hari dan maksimal tujuh hari; [4] **kelengkapan sarana dan prasarana**, pemanfaatan *Information Technology* (IT) dengan sistem jaringan *Local Area Network* (LAN) dan semua proses perizinan menggunakan sistem komputerisasi; [5] **kemudahan akses**, lokasi Sintap sangat mudah diakses [6] **kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan petugas**, petugas Sintap dibekali keterampilan khusus untuk memberikan layanan yang excellent (terbaik), dan [7] **kenyamanan**, kantor pelayanan memang dibangun khusus untuk pelayanan Sintap. Adapun alur mekanisme pelayanan:

1. Pemohon mengisi formulir aplikasi yang dapat diperoleh secara gratis di loket informasi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung secara jelas dan lengkap sesuai jenis permohonannya
2. Loket Pendaftaran menerima permohonan perizinan yang telah memenuhi persyaratan, dengan memberikan bukti penerimaan berkas berupa *checklist* pendaftaran perizinan. *Checklist* ini juga menunjukkan jadwal penyelesaian perizinan dan waktu pengambilan oleh pemohon.
3. Loket pemrosesan melakukan *input* data permohonan dan mencetak perizinan setelah disetujui oleh kepala dinas teknis terkait
4. Petugas penghubung menyampaikan berkas perizinan kepada dinas teknis guna dilakukan tinjauan lapangan

5. Kepala dinas teknis membubuhkan tandatangan persetujuan penerbitan perizinan pada lembar disposisi atau hasil tinjauan di lapangan. Berkas dikembalikan ke kantor Sintap oleh petugas penghubung
6. Loket Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) mencetak SKRD sesuai tarif dalam peraturan daerah tentang perizinan dimaksud. SKRD merupakan media pembayaran retribusi ke loket Bank Sulsel Cabang Parepare yang juga tersedia di dalam kantor Sintap.
7. Pemohon membayar retribusi dengan menggunakan media SKRD langsung pada Bank Sulsel dan SKRD yang telah divalidasi oleh petugas bank digunakan sebagai bukti pengambilan perizinan
8. Loket penyerahan perizinan kepada pemohon dengan membuat bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pemohon dan petugas loket

Tidak hanya itu, dalam rangka peningkatan kualitas layanan, kantor Sintap juga berinovasi melalui penyederhanaan prosedur layanan dengan mengurangi waktu penyelesaian layanan perizinan dari tujuh hari menjadi empat hari, kecuali untuk IMB yang masih tetap tujuh hari. Di samping itu, yang berwenang menandatangani semua jenis perizinan adalah kepala kantor Sintap. Berikut jenis-jenis perizinan dan lama penyelesaian:

No.	Jenis Surat Izin	Waktu	
		2008 (hari)	2009 (hari)
1	Izin Pemasangan Reklame	3	3
2	Izin Tempat Usaha * gratis	7	4
3	Izin Undang-undang Gangguan / HO	7	4
4	Izin Trayek Angkutan Kota	2	2
5	Izin Alat Berat	2	2
6	Izin Pelataran	1	1
7	Izin Mendirikan Bangunan	7	7
8	Akta Catatan Sipil : Kelahiran *gratis	2	2
9	Kematian	2	2
10	Perkawinan	2	2
11	Perceraian	2	2
12	Pengsahaan Anak	2	2
13	Pengangkatan Anak	2	2
14	Penggantian Nama	2	2
15	Pengakuan Anak	2	2
16	Nomor Pokok Wajib Pajak *gratis	1	1
17	Izin Usaha Perdagangan*Gratis	7	4
18	Tanda Daftar Perusahaan	7	4

No.	Jenis Surat Izin	Waktu	
		2008 (hari)	2009 (hari)
19	Tanda Daftar Industri *gratis	7	4
20	Izin Usaha Industri *gratis	7	4
21	Tanda Daftar Gudang	7	4
22	Tanda Daftar Ruang	7	4
23	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2	2
24	Izin Usaha Angkutan	2	2
25	Izin Penggunaan Tanah	7	4
26	Izin Rumah Bersalin	3	3
27	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Bersalin	3	3
28	Izin Toko Obat	3	3
29	Izin Apotek	3	3
30	Izin Penggantian Apoteker	3	3
31	Izin Kepariwisataaan	3	3
32	Kartu Keluarga	1	1
33	Kartu Tanda Penduduk	1	1
34	Izin Praktik Dokter Umum	3	3
35	Izin Praktik Dokter Gigi	3	3
36	Izin Praktik Dokter Spesialis	3	3

Bukan hanya itu, seluruh pembiayaan dilakukan secara transparan sehingga tidak memungkinkan adanya permasalahan terkait mekanisme biaya jasa layanan. Bahkan, untuk hal tersebut, kantor Sintap telah mendapat pengakuan internasional dengan diperolehnya sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 dari WQA London. Semua jenis pelayanan telah ditetapkan retribusinya dan akan tertera pada catatan kaki setiap lembar



Aktivitas layanan perizinan di kantor Sintap Parepare

perizinan yang langsung dibayarkan di loket Bank Sulsel yang berada di dalam kantor Sintap.

Kualitas mutu layanan kantor Sintap yang semakin prima tentu saja mengundang perhatian banyak pihak. Tidak saja dari pemerintah daerah di wilayah Sulawesi tetapi juga dari luar Sulawesi. Kantor Sintap Parepare telah menerima kurang lebih 295 kunjungan dari sejumlah kabupaten-kota/provinsi

dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka melakukan kunjungan ke daerah berjarak 150 km dari utara Makassar tersebut untuk mempelajari mekanisme Sintap seperti kunjungan Pemerintah Kota Bontang. Selain itu, Kantor Sintap Parepare mendapat sekitar 74 undangan dari pemerintah kabupaten-kota dan provinsi sebagai narasumber seminar dan lokakarya, serta menjadi pendamping penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare selama ini memberikan dukungan yang cukup besar terhadap keberadaan Sintap. Terbukti, sejak terbentuknya pada Tahun 2001, kantor Sintap terus mengalami perkembangan. Salah satu bentuk dukungan pemkot adalah melakukan perubahan status kelembagaan yang sebelumnya hanya Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di bawah sekretariat daerah kini menjadi kantor yang berdiri sendiri.

Sebagai wujud komitmen pemkot dalam melakukan pembenahan kantor Sintap, pemkot mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Dengan perda tersebut Sintap menjadi otonom dan memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengembangkan kelembagaannya. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Kantor Pelayanan Perizinan.

Hingga sekarang, pemerintah kota terus memberikan perhatian dan mempertimbangkan peningkatan status kantor menjadi badan bersama dengan penanaman modal. Jika hal tersebut terealisasi maka akan semakin memudahkan masyarakat dan para investor berinvestasi di Parepare yang niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(andha\_85@yahoo.co.id)

**kantor Sintap telah  
mendapat pengakuan  
internasional  
dengan diperolehnya  
sertifikat sistem  
manajemen mutu ISO  
9001: 2000 dari WQA  
London**



• • •



# SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL (SISDUK)

KABUPATEN TAKALAR



**Parameter** : Performa Politik  
**Kategori** : Partisipasi Publik dan Kesenambungan Politik  
**Isu Strategis** : Proses Pembangunan (Perencanaan, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi)

## Keterlibatan dalam Program

- a. Leading Sector : BPMPD
- b. Pelaku Program : Masyarakat
- c. Instansi yang Terlibat : Lintas Sektor
- d. Penanggung Jawab : Kabid. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- e. Pelaksana Program : Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- f. Rekanan : JICA dan LSM Lokal

## Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan program dimulai sejak Tahun 2002

## Latar Belakang

Kebijakan Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal (Sisduk) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Takalar yang lahir setelah adanya Proyek “Strengthening Sulawesi Rural Community Development to Support Poverty Alleviation Programmes” atau proyek kerjasama antara Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dicanangkan di Takalar pada Tahun 1997. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat miskin pada desa-kelurahan se Kabupaten Takalar. Survei awal menunjukkan: (i) lemahnya kemampuan aparat pembangunan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan; (ii) mekanisme perencanaan yang memakan waktu yang terlalu lama yaitu sekitar 22 bulan sejak perencanaan sampai implementasi; (iii) bergantungnya masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan; dan (v) rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.



# Menggalang Potensi dan Kemandirian Lokal

Laporan: Sundari Usman



**K**ebijakan Sisduk mulai dilaksanakan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2002 yang merupakan hasil lanjutan proyek kerjasama PMD-JICA dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2002 tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal (Sisduk).

Sisduk didasarkan pada konsep Participatory Local Social Development (PLSD) dengan tiga kegiatan utama, yaitu: (1) pelatihan PLSD; (2) Sistem Dukungan Terpadu Pembangunan Masyarakat Desa Lokal (Sisduk); dan (3) akselerasi kegiatan masyarakat.

Pelatihan PLSD yang memperkenalkan konsep PLSD kepada aparat pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku pembangunan. Bagi aparat pemerintah ada tiga kelompok sasaran sesuai dengan tingkatannya yaitu, pertama, pelatihan PLSD versi perencanaan untuk para perencana di tingkat kabupaten, kedua, pelatihan PLSD versi petugas garis depan bagi para staf kecamatan, dan ketiga, pelatihan PLSD versi petugas garis depan bagi staf kabupaten yang terkait langsung dengan kegiatan masyarakat.

Sisduk dan akselerasi kegiatan masyarakat merupakan dua kegiatan dalam kebijakan Sisduk yang secara langsung diterapkan di Kabupaten Takalar untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih mandiri.

Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi kelemahan mekanisme perencanaan pembangunan yang lama. Sisduk bertujuan memperkenalkan model pembangunan partisipatoris di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan sampai pada implementasi kegiatan. Perencanaan pembangunan pada sistem ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik masyarakat setempat.

Dengan pendekatan partisipatoris yang menekankan pada proses pembangunan yang berbasis pada pengalaman dan kemampuan masyarakat lokal diharapkan dapat mengantarkan masyarakat pada kemandirian, masyarakat sendiri yang mengidentifikasi, memecahkan, dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun mekanisme sistem dukungan dalam kebijakan Sisduk yakni

## 1. Penyusunan usulan kegiatan masyarakat

Proses ini dimulai dari persiapan sosial yang dilakukan oleh *Field Officer* (FO) dengan melakukan kegiatan penyadaran dan pengorganisasian masyarakat (akan dijelaskan pada kegiatan akselerasi kegiatan masyarakat). Selanjutnya dengan berkelompok yang difasilitasi oleh FO kemudian membuat usulan kegiatan. Usulan kegiatan tersebut memiliki motto mudah, jelas, dan skala kecil. Mudah dalam arti kegiatan yang direncanakan oleh kelompok